

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Jayapura

2.1.1 Geografis dan Iklim

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Jayapura



Irian Jaya definitif kembali ke Indonesia 1 Maret 1963. Sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang (2020) sudah 57 tahun berlalu. Banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya. Kabupaten Jayapura terjadi perubahan dibidang pemerintahan. Ibukota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi kota Administratif (kotif) Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26/1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura, maka dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri No. 5 tahun 1979 dan Instruksi Mendagri No. 30 tahun 1979, Kota Jayapura pada hari Jumat, 14 September 1979, di resmikan sebagai Kota Administratif oleh Haji Amir Machmud, Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia. Pada hari yang sama dilantik Drs. Florens Imbiri sebagai Walikota Jayapura oleh Haji Soetran, Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya. Lokasi peresmian Kotif Jayapura adalah halaman kantor Dharma Wanita Propinsi Irian Jaya, Jl. Sam Ratulangi Dok 5 Atas. Jadilah kota administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke 12 di Indonesia, Walikota Adminstratif pertama Drs. Florens Imbiri 1979 - 1989, Walikota Administratif kedua Drs. Michael Manufandu, MA 1989-1993. Berdasarkan UU No. 6 tahun 1993, Kota Adminstratif Jayapura menjadi Kotamadya Dati II Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S.M bertempat di lapangan Mandala Jayapura. Pada hari yang sama dilantik Drs. R. Roemantyo sebagai Walikota KDH. Tingkat II Jayapura.

Walikota KDH. Tingkat II Jayapura menyusun dan melengkapi aparat, dinas otonom, dan dinas vertikal serta membentuk DPRD Kota, sesuai UU No, 5. tahun 1974 WaliKota KDH Tingkat II Jayapura dipilih oleh DPRD Kota dan terpilih Drs. R. Roemantyo sebagai WaliKota yang definitif periode 1994/1995-1998/1999. Sekretariat Kota untuk pertama kali berkantor di Yoka menempati eks kompleks APDN di pinggir Danau Sentani. Setelah kantor baru berlokasi di Entrop selesai dibangun, pada bulan Juli 1998 kantor pindah ke Entrop di Jln. Balai Kota No. 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan. Tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Drs. M. R. Kambu, M.Si sebagai Walikota Jayapura dan J.I Renyaan, SH sebagai Wakil Walikota Jayapura periode 1999/2000 – 2004/2005. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004-2005 dalam sejarah demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Jayapura pada khususnya dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dimana masyarakat Kota Jayapura masih memberi

kepercayaan kepada Drs. M.R Kambu, M.Si sebagai Walikota Jayapura dan Sudjarwo, BE sebagai Wakil Walikota Jayapura periode 2005-2010. Selanjutnya tongkat estafet Pemerintahan Kota Jayapura dilanjutkan oleh Drs. Benhur Tommi Mano, MM sebagai Walikota Jayapura dan DR. H. Nur Alam, SE, M.Si sebagai Wakil Walikota periode 2011 – 2016 kemudian ditahun Drs. Benhur Tommi Mano, MM melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Walikota Jayapura periode tahun 2018 - 2022.

Visi :

“Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri, dan Modern berbasis kearifan lokal“.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama
2. Melanjutkan Penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional
3. Membangun kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman
4. Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat
5. Mengembangkan potensi ekonomi kota sebagai kota jasa dan perdagangan serta utilitas perkotaan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi
7. Memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat kampung

Kota Jayapura adalah kota paling timur Indonesia di bagian utara Provinsi Papua. Jayapura merupakan ibukota provinsi Papua dengan luas wilayah 94.000 ha. Kota Jayapura resmi ditetapkan sebagai wilayah administratif pada tanggal 14 September 1979 dan berubah status menjadi Kotamadya pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993. Secara geografis Kota

Jayapura berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea, sebelah selatan dengan Distrik Skamto Kabupaten Keerom; dan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura di sebelah barat..

Wilayah Kota Jayapura terbagi atas lima distrik, dengan rincian sebanyak 14 kampung dan 25 kelurahan, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami.

Pada tahun 2018 Kota Jayapura mengalami suhu tertinggi pada Bulan Mei yang mencapai 31,9 0C, sedangkan suhu terendah terjadi pada Bulan Februari mencapai 25,1 0C. Kelembaban udara yang terjadi selama tahun 2018 sebesar 84,5 persen. Kota Jayapura mendapat penyinaran cahaya matahari sepanjang tahun, dan turun hujan setiap bulan selama tahun 2018. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Bulan November sebanyak 24 hari, dan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada Bulan September, yaitu hanya terjadi 11 hari hujan saja. Sementara itu banyaknya curah hujan yang turun selama tahun 2018 mencapai 2.695,5 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada Bulan Desember mencapai 422,7 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu hanya mencapai 93,1 mm.

2.1.2 Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk memantau derajat kesehatan sekaligus sebagai evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor - faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan,

melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya. Pada prinsipnya pembangunan kesehatan telah menunjukkan suatu keberhasilan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan tersebut perlu dilakukan analisis situasi dan kecenderungan di masa mendatang. Tahun 2018 jumlah rumah sakit di Kota Jayapura ada sebanyak 7 unit. Sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu sejumlah 36 unit puskesmas/pustu. Jumlah dokter pada tahun 2018 ada sebanyak 35 orang, sedangkan jumlah tenaga paramedis mencapai 276 orang. Jumlah pasangan usia subur tahun 2018 sebanyak 37.955 pasangan dan Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai peserta KB adalah bentuk suntikan (24.832).

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani mental sosial penduduk. Informasi mengenai derajat kesehatan bermanfaat untuk menilai status kesehatan suatu wilayah, membandingkan status kesehatan antar wilayah, menilai kebutuhan pelayanan kesehatan, merencanakan dan implementasi pelayanan kesehatan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan. Derajat kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka tersebut didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Pada tabel 2.2 dapat dilihat series data Angka Harapan Hidup (AHH) dari tahun 2014 hingga tahun 2018 baik untuk Kota Jayapura maupun Provinsi Papua.

Kota Jayapura pada tahun 2018 adalah 70,15 tahun, yang artinya tiap bayi yang lahir secara rata-rata diharapkan dapat hidup hingga usia 70,15 tahun. AHH penduduk Provinsi Papua tahun 2018 meningkat dibandingkan AHH lima tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 65,36 tahun. AHH Kota Jayapura selama lima tahun terakhir hanya meningkat 0,2 poin. Peningkatan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Papua yang mencapai 0,52 poin. Secara umum AHH Kota Jayapura lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan Kota Jayapura lebih baik dibandingkan Provinsi Papua.

Kota Jayapura pada tahun 2018 adalah 70,15 tahun, yang artinya tiap bayi yang lahir secara rata-rata diharapkan dapat hidup hingga usia 70,15 tahun. AHH penduduk Provinsi Papua tahun 2018 meningkat dibandingkan AHH lima tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 65,36 tahun. AHH Kota Jayapura selama lima tahun terakhir hanya meningkat 0,2 poin. Peningkatan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Papua yang mencapai 0,52 poin. Secara umum AHH Kota Jayapura lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan Kota Jayapura lebih baik dibandingkan Provinsi Papua.

Tabel 2.1
Angka Harapan Hidup Kota Jayapura dan Provinsi Papua

AHH					
Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Jayapura	69.95	69.97	69.99	70.00	70.15
Papua	64.84	65.09	65.12	65.14	65.36

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jayapura 2019

2.1.3 Kemiskinan

Banyaknya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sementara GKBM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Kota Jayapura dan Provinsis Papua

Tahun	Garis kemiskinan	
	Kota Jayapura	Papua
2013	700.719	339.096
2014	716.186	358.204
2015	763.326	402.031
2016	805.746	427.176
2017	849.496	457.541
2018	944.479	499.463

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jayapura 2019

Tabel 2.3 menyajikan Garis Kemiskinan Kota Jayapura dan Papua. Dari tahun ke tahun Garis Kemiskinan terus mengalami kenaikan, baik di Kota Jayapura maupun di Papua. Selama 2017 – 2018 terjadi kenaikan GK sebesar Rp 94.983,- atau sebesar 11,18 persen. Hal senada juga terjadi di Papua dimana GK dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebanyak 9,16 persen. Ini menggambarkan penduduk Papua

dan Kota Jayapura perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak untuk makanan dan bukan makanan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di Kota Jayapura jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan di Papua.

Tabel 2.3
Perguruan Tinggi yang Mempunyai Jurusan Kesehatan Di Kota Jayapura

No	Nama Perguruan Tinggi
1	Universitas Cenderawasih
2	Politeknik Kesehatan Kota Jayapura
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Jayapura
4	Akademi Keperawatan Kota Jayapura

Tabel 2.3.1 menyajikan data perguruan tinggi di Kota Jayapura yang mempunyai Jurusan Kesehatan dimana ada Universitas Cenderawasih dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Politeknik Kesehatan Kota Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Jayapura dan Akademi Keperawatan Kota Jayapura.

2.1.4 Otonomi khusus

Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahn sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi

pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.

Dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban dasar rakyat Papua, rancangan undang-undang Otonomi Khusus Papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sejumlah nilai-nilai dasar ini bersumber dan adat istiadat rakyat Papua. nasionalisme yang bertumpu pada prinsip prinsip manusia universal. Dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Karena itulah, nilai nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakangi penyusunan kerangka dasar Rancangan Undang undang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang. Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua:

1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar Peaduduk Asli Papua
2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
3. Penghargaan terhadap Etika dan Moral
4. Penghargaan terhadap hak-hak Asasi Manusia
5. Penegakan Supremasi hukum
6. Penghargaan terhadap Pluralisme
7. Persamaan kedudukan, huk dan kewajiban sebagai warga negara

Tabel 2.4
Penerimaan dana otonomi khusus Papua untuk Tahun anggaran 2012-2018

PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012-2018				
NO	TAHUN	DANA OTSUS	DTI	TOTAL OTSUS
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2012	3,833,402,135,000.00	571,428,571,000.00	4,404,830,706,000.00
2	2013	4,355,950,048,000.00	571,428,572,000.00	4,927,378,620,000.00
3	2014	4,777,070,975,000.00	2,000,000,000,000.00	6,777,070,975,000.00
4	2015	4,940,429,880,000.00	2,250,000,000,000.00	7,190,429,880,000.00
5	2016	5,395,051,859,400.00	1,200,000,000,000.00	6,595,051,859,400.00
6	2017	5,580,152.407,000.00	2,625,000,000,000.00	8,205,152,407,000.00
7	2018	5,580,152.407,000.00	2,625,000,000,000.00	8,205,152,407,000.00
	Total	53,668,243,125,550.00	15,329,231,832,000.00	68,997,474,957,550.00

Sumber : bpkad papua

Tabel 2.5
pembagian dana otsus kepada setiap Kabupaten dan Kota. Tahun 2018

No	Kota	Dana Otsus
1	Kota Jayapura	95,555,051,000.00

Sumber : bpkad papua

Tabel 2.6
Anggaran Otonomi Khusus Kota Jayapura Bidang Kesehatan Tahun 2015

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi/Penyuluhan Kesehatan	350.000.000	Otsus
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
2	Akreditasi Registrasi dan Pelatihan	131.000.000	Otsus
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Pustu	300.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
4	Operasional Pusat Kesehatan Reproduksi	237.723.200	Otsus
5	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Daerah Perbatasan	600.000.000	Otsus
6	Penyelenggaraan Layanan Dokter Spesialis ke Puskesmas	600.000.000	Otsus
7	Temu Kader Posyandu Kota Jayapura	800.000.000	Otsus
8	Peningkatan Keselamatan Anak dan Remaja	700.000.000	Otsus
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		
9	Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat (MMD) untuk Memonitor Perkembangan Kampung Siaga Aktif di 14 Kampung	292.406.450	Otsus
10	Pelatihan PTM Posbindu Terintegrasi bagi petugas Kesehatan dan Jejaring Posbindu di 13 Puskesmas Kota Jayapura	300.000.000	Otsus
11	Pelatihan Dokter Kecil	300.000.000	Otsus
	Program Perbaikan GIZI		
12	Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat	1.187.128.000	Otsus
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
13	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman (Penunjang AMPL)	75.000.000	Otsus
14	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Kampung	330.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
15	Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan	200.000.000	Otsus
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
16	Penanggulangan Penyakit Menular, IMS dan HIV/AIDS	600.000.000	Otsus
17	Penanggulangan Wabah dan Bencana	300.000.000	Otsus
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
18	Pemutakhiran Data Standart Pelayanan Kesehatan	100.000.000	Otsus
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
19	Pengobatan Langsung Cuma-Cuma	550.000.000	Otsus
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
20	Pembangunan Rumah sakit Muara Tami Type C (Perbatasan) Tahap III	3.000.000.000	Otsus
21	Peningkatan Kesehatan Keluarga Masyarakat Port Numbay	710.700.000	Otsus
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
22	Penyelenggaraan Pendidikan Akper Port Numbay	620.000.000	Otsus
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
23	Pengadaan Perlengkapan Persalinan Ibu Hamil dan Bayi-balita	500.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Peningkatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
24	Pelayanan Kesehatan Lansia	500.000.000	Otsus
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak		
25	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	799.300.000	Otsus
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan		
26	Penyediaan peralatan Posyandu Untuk Kampung	200.000.000	Otsus
	Jumlah Keseluruhan Kesehatan	14.283.257.650	Otsus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Tabel 2.7
Anggaran Otonomi Khusus Kota Jayapura Bidang Kesehatan Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
1	Operasional Pusat Kesehatan Reproduksi	350.000.000	Otsus
2	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Daerah Perbatasan	950.000.000	Otsus
3	Penyelenggaraan Layanan Dokter Spesialis ke Puskesmas	900.000.000	Otsus
4	Peningkatan Kesehatan Keluarga Masyarakat Papua	800.000.000	Otsus
5	Pelatihan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	270.000.000	Otsus
6	Penunjang Kader Posyandu & Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	800.000.000	Otsus
7	Akreditasi Registrasi dan Pelatihan	300.000.000	Otsus
8	Penyelenggaraan Posbindu PTM	350.000.000	Otsus
9	Pendampingan tim BIMTEK terpadu oleh Komite kesehatan (MSF) dan Dinas Kesehatan	325.000.000	Otsus
10	Pelatihan Sistem informasi Posyandu dan Pemantauan wilayah setempat	295.000.000	Otsus
11	Penjaringan kesehatan anak sekolah	130.000.000	Otsus
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		
12	Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam Layanan Kesehatan ibu dan anak	600.000.000	Otsus
13	Kampung Siaga Aktif	290.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
14	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan	250.000.000	Otsus
15	Pelatihan Dokter Kecil	200.000.000	Otsus
	Program Perbaikan GIZI		
16	Pemberian Makanan Tambahan	200.000.000	Otsus
17	Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat	800.000.000	Otsus
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
18	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman (Penunjang AMPL)	250.000.000	Otsus
19	Pengawasan dan Pemeriksaan Laboratorium Depot Air Minum	455.000.000	Otsus
20	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Kampung	330.000.000	Otsus
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
21	Penanggulangan Penyakit Menular, IMS dan HIV/AIDS	690.000.000	Otsus
22	Penanggulangan Wabah dan Bencana	200.000.000	Otsus
23	Pengasapan/Fogging DBD/Malaria (Massal)	400.000.000	Otsus
24	Penanganan (MBS dan obati) Penyakit Malaria menuju eliminasi Malaria Tahun 2020	350.000.000	Otsus
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
25	Pengobatan Langsung Cuma-Cuma	650.000.000	Otsus
26	Dukungan Pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS)	550.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
27	Pembangunan Pustu di Kayo Pulau	250.000.000	Otsus
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
28	Pelayanan Kesehatan Lansia	450.000.000	Otsus
29	Penyelenggaraan Pendidikan Akper Port Numbay	450.000.000	Otsus
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
30	Pengadaan Perlengkapan Persalinan Ibu Hamil dan Bayi-balita	350.000.000	Otsus
Jumlah Keseluruhan Kesehatan		13.185.000.000	Otsus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Tabel 2.8
Anggaran Otonomi Khusus Kota Jayapura Bidang Kesehatan Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
1	Operasional Pusat Kesehatan Reproduksi	350.000.000	Otsus
2	Penunjang Tenaga Kesehatan Daerah Perbatasan	950.000.000	Otsus
3	Biaya Operasional Dokter Spesialis	713.300.000	Otsus
4	Peningkatan Kesehatan Keluarga Masyarakat Papua	945.680.000	Otsus
5	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Pembayaran Insentif Kader	800.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
6	Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan di 5 Distrik	300.000.000	Otsus
7	Pendampingan tim BIMTEK terpadu oleh Komite kesehatan (MSF) dan Dinas Kesehatan	375.000.000	Otsus
8	Pelatihan Sistem informasi Posyandu dan Pemantauan wilayah setempat	302.000.000	Otsus
9	Penjaringan kesehatan anak sekolah	130.000.000	Otsus
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		
10	Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam Layanan Kesehatan ibu dan anak	700.000.000	Otsus
11	Perkembangan Kampung Siaga Aktif di 14 Kampung dan Replikasi ke 15 Kelurahan	290.000.000	Otsus
12	Pelatihan Dokter Kecil	200.000.000	Otsus
13	Implementasi Promosi Kesehatan di 5 distrik (5 Kampung dan 4 Kelurahan)	270.000.000	Otsus
14	Penyelenggaraan Posyandu Penyakit Tidak Menular (PTM) Kota Jayapura	350.000.000	Otsus
	Program Perbaikan GIZI		
15	Pemberian Makanan Tambahan	200.000.000	Otsus
16	Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat	800.000.000	Otsus
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
17	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman (Penunjang AMPL)	200.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
18	Pengawasan dan Pemeriksaan Laboratorium Depot Air Minum	255.000.000	Otsus
19	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman	277.530.000	Otsus
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
20	Penanggulangan Penyakit Menular, IMS dan HIV/AIDS	794.900.000	Otsus
21	Penanggulangan Wabah dan Bencana	309.876.000	Otsus
22	Pengasapan/Fogging DBD/Malaria (Massal)	406.479.000	Otsus
23	Penanganan Penyakit Malaria menuju eliminasi Malaria Tahun 2027	431.215.000	Otsus
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
24	Pengobatan Langsung Cuma-Cuma	500.000.000	Otsus
25	Dukungan Pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS)	800.000.000	Otsus
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
26	Pembangunan Pustu di Kayo Pulau Tahap II	250.000.000	Otsus
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
27	Pelayanan Kesehatan Lansia	584.000.000	Otsus
28	Penyelenggaraan Pendidikan Analis kelas khusus	357.800.650	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
29	Satuan Pengamanan (SATPAM) di Tiga Belas Puskesmas (13 PKM)	300.000.000	Otsus
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
30	Pengadaan Perlengkapan Persalinan Ibu Hamil dan Bayi-balita	350.000.000	Otsus
	Jumlah Keseluruhan Kesehatan	13.442.780.650	Otsus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Tabel 2.9
Anggaran Otonomi Khusus Kota Jayapura Bidang Kesehatan Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
1	Pengadaan Obat dan Pengiriman ke Puskesmas dan Jaringannya Termasuk Obat ARV	398.459.000	Otsus
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
2	Penunjang Tenaga Kesehatan Daerah Perbatasan	1.300.000.000	Otsus
3	Biaya Operasional Dokter Spesialis	950.000.000	Otsus
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Pustu	250.000.000	Otsus
5	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Pembayaran Insentif Kader	1.600.000.000	Otsus
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		
6	Pelatihan Dokter Kecil	220.000.000	Otsus
7	Pelatihan Kader Pos Pembinaan Terpadu	385.000.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
8	Penyuluhan Kesehatan Bagi Masyarakat di 14 kampung	300.000.000	Otsus
9	Penyuluhan langsung kepada Masyarakat	770.000.000	Otsus
	Program Perbaikan GIZI Masyarakat		
10	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	580.000.000	Otsus
11	Pemberian Makanan Tambahan	220.000.000	Otsus
12	Pelatihan PWS Gizi Masyarakat dan APN (Asuhan Persalinan Normal)	300.000.000	Otsus
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
13	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman	204.000.000	Otsus
14	Pembentukan Tim Kota Sehat	610.00.000	Otsus
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
15	Penanganan Penyakit Malaria menuju eliminasi Malaria Tahun 2027	400.000.000	Otsus
16	Penanganan Penyakit Menular Malaria, Filariasis, Kusta dan Frambusia, TB-Paru dan HIV/AIDS	810.798.000	Otsus

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
17	Pengobatan Langsung (Cuma-Cuma) pada Masyarakat	550.000.000	Otsus
18	Skrining Kesehatan Keluarga Masyarakat Papua (OAP)	850.000.000	Otsus
19	Kerja Sama dengan NGO, LSM Lokal, Toga, Tokoh Perempuan dan Tokoh Masyarakat	700.000.000	Otsus
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
20	Pengadaan Perlengkapan Persalinan Ibu Hamil dan Bayi-balita	400.000.000	Otsus
21	Peningkatan Peran Posyandu	330.000.000	Otsus
	Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia		
22	Pengembangan Posyandu Lansia	600.000.000	Otsus
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
23	Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir OAP	1.000.000.000	Otsus
	Jaminan Kesehatan Masyarakat asli Papua		
24	Pemberian Jaminan Kesehatan Kepada Orang Asli Papua	605.000.000	Otsus
		14.333.257.650	Otsus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Tabel 2.10
Anggaran Otonomi Khusus Kota Jayapura Bidang Kesehatan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	Program Peningkatan Kesehatan anak balita		
1	Peningkatan Peran Posyandu dalam rangka Peningkatan Kesehatan Anak Balita Orang Asli Papua	1.600.000.000	Otsus
	Jaminan Kesehatan Masyarakat Asli Papua		
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	144.000.000	Otsus
	Program Peningkatan Kesehatan Perorangan		
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien OAP	499.700.000	Otsus
4	Pengendalian penyakit polio, pengendalian penyakit TB Paru, Pengendalian penyakit ISPA, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PMS, pengendalian penyakit demam berdarah dengue, pengendalian penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta.	213.050.000	Otsus
	Program Sumber Daya Kesehatan		
5	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Melalui Pelaksanaan D3, D4, S1, S2 Kesehatan	648.500.000	Otsus
		3.907.915.000	Otsus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Tabel diatas menunjukkan total anggaran Otonomi khusus bidang kesehatan Kota Jayapura yang dimana dari tahun ke tahun dana yang dikucurkan pemerintah terbilang cukup besar. Untuk Tahun 2018 sendiri dana Otonomi khusus yang dikeluarkan paling besar dibanding dengan tahun 2015,2016,2017 dan 2019 yaitu 14,333,257,650. Program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terbilang cukup banyak contohnya adalah memberikan pengobatan langsung (cuma-cuma), Dukungan Pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS),Pembangunan Pustu, Pembangunan RS Type C, Skrining Kesehatan Keluarga Masyarakat Papua (OAP). Untuk Tahun 2019 sendiri terdapat banyak kegiatan yang tidak dibiayai oleh Otonomi khusus karena akan berlangsung kegiatan PON Papua 2020 sehingga sebagian dana Otonomi Khusus dikucurkan untuk menunjang kegiatan tersebut.

2.1.5 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2018, tercatat sebanyak 299.775 orang atau bertambah 1,32 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura dengan jumlah 84.590 orang. Sedangkan Distrik Muara Tami merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 13.045 orang. Dengan luas wilayah 940 km² berarti kepadatan penduduk Kota Jayapura 319 jiwa/km². Tahun 2018, jumlah rumah tangga di Kota Jayapura tercatat 70,094 rta. Dengan jumlah penduduk laki-laki 159,600 jiwa dan perempuan 138,175 jiwa, rasio jenis kelamin di Kota Jayapura sebesar 115 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 15 persen daripada penduduk perempuan. Penduduk Kota Jayapura didominasi oleh kelompok penduduk usia 20-24 tahun. Sementara itu kelompok penduduk usia tua (60 tahun ke atas) mempunyai proporsi yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi.

Tahun 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura sebesar 2,83 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk 1,87 persen kembali berada di bawah 2 persen yang berarti laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura berada di kriteria sedang

Tabel 2.11
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kota Jayapura Tahun 2014 - 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk	275.694	283.490	288.786	293.690	297.775
Jumlah laki-laki	144.440	151.450	154.096	157.710	159.600
Jumlah Perempuan	131.254	132.040	134.690	135.980	138.175
Laju Pertumbuhan	1,16	2,83	1,87	1,70	1,4
Rasio jenis kelamin	110.05	114.70	114.41	115.98	115.50

Sumber : Bps Kota Jayapura

Indikator kependudukan lainnya yang juga penting adalah rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Angka ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dari 297.775 jiwa penduduk di tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki sebanyak

159.600 jiwa (53,59 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 138.175 jiwa (46,40 persen). Dengan demikian, rasio jenis kelamin tahun 2018 sebesar 115,60. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 115-116 penduduk laki-laki.

Tahun 2018, jumlah pencari kerja (pencaker) di Kota Jayapura tercatat 8.980 orang, terdiri dari 4.705 pencaker laki-laki dan 4.275 pencaker perempuan. Sebagian besar tingkat pendidikan pencaker adalah Sarjana (S1) yang mencapai 3.685 orang atau 41 persen. Pencaker paling banyak berumur antara 20-29 tahun yang mencapai 3.238 orang atau 73,06 persen.

2.1.6 Pemerintahan

Anggota DPRD Kota Jayapura ada sebanyak 40 orang yang terbagi ke dalam 8 fraksi. Dimana keanggotaan DPRD Kota Jayapura didominasi oleh fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 22,5 persen. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2018 di dominasi oleh laki-laki (75 Persen). Pemerintahan yang baik tentunya ditunjang oleh kuantitas serta kualitas pegawai yang terdapat didalamnya. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 4.222 orang pegawai negeri sipil (PNS) otonom di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Di tahun 2018, sebagian besar PNS otonom ini merupakan lulusan Strata 1 (S1) yang mencapai hingga 1.989 orang. Jika ditinjau berdasarkan golongannya, separuh PNS otonom di Kota Jayapura berada pada golongan III (47,23 persen).